

313.243  
PUR  
P



DOSEN MUDA

LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN DOSEN MUDA

**PROFIL SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN)  
DI JAWA TENGAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN  
DASAR POLISI DALAM RANGKA MENYIAPKAN  
POLISI PROFESIONAL DAN MANDIRI**

Oleh :

Ani Purwanti, SH, M. Hum  
Nur Rochaeti, SH, M. Hum  
Kartini Sekartadji, SH, M. Hum

Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda  
Nomor : 028/P4T/DPPM/DPM/III/2003 Tanggal 28 Maret 2003

FAKULTAS HUKUM  
UNIOVERSITAS DIPONEGORO  
NOPEMBER, 2003

## RINGKASAN

Sistem rekrutmen polisi di Indonesia melalui 3 jalur, yaitu :

1. Sekolah Polisi Negara (SPN) yang mensyaratkan pendidikan terendah SMU atau sederajat dan lulusannya menjadi ujung tombak tugas polisi di masyarakat.
2. Akademi Kepolisian (AKPOL) yang mensyaratkan pendidikan terendah SMU, atau lulusan SPN yang berprestasi tetapi output atau lulusannya adalah polisi elite.
3. Sumber Sarjana yang mensyaratkan para sarjana multi disiplin.

Pendidikan di SPN mencetak polisi siap pakai di masyarakat dengan segala permasalahannya, hal ini menjadikan polisi harus professional artinya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik kepolisian. Seperti diketahui profesionalisme polisi mensyaratkan pendidikan sebagai faktor utama, yang mana dimulai dari pendidikan dasar (SPN) sampai jenjang tertinggi yaitu PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian).

Tugas polisi yang baik dan professional bisa dicapai melalui 2 macam kurikulum yaitu: Kurikulum teoritis dan Kurikulum praktis. Kurikulum teoritis adalah kurikulum yang mencakup pengenalan dan pembelajaran tugas dan fungsi polisi baik sebagai pelayan, pengayom masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Sedangkan kurikulum praktis adalah kurikulum yang merupakan pendidikan latihan kemahiran polisi dan praktek pelaksanaan tugas polisi di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di SPN Purwokerto dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari penjelasan kepala SPN dan jajarannya di SPN Purwokerto. Data sekunder diambil melalui studi literatur, dokumen hukum, hasil penelitian, maupun dokumen lainnya. Teknik pengumpulan yaitu dengan studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara.

Sekolah Polisi Negara Purwokerto mendidik polisi bintara untuk wilayah Jawa Tengah. Selama ini pola pendidikan yang diterapkan adalah 6 bulan proses belajar dan setelah itu langsung bertugas di masyarakat baik sebagai penjaga ketertiban masyarakat maupun ujung tombak penegakan hukum serta tantangan

terbesar saat ini yaitu bukan sebagai alat penguasa. Salah satu perubahan mendasar yang ditemukan yaitu sejak tahun 2002 pola pendidikan berubah menjadi 11 bulan dengan pembagian yaitu 5 bulan pendidikan melalui proses belajar mengajar di SPN, 5 bulan magang di Polres dan Polwil serta 1 bulan merupakan pembulatan pendidikan. Perubahan pola ini diharapkan bisa merubah keluaran SPN menjadi siap pakai dan pada akhirnya dapat menjalankan tugas pekerjaan di masyarakat dengan baik (professional). Pada saat penelitian dilakukan para siswa sedang menjalani proses belajar mengajar (PBM) yaitu 900 siswa dan sebagian lagi (742 siswa) sedang menjalani proses magang di Polres dan Polwil untuk pertama kali. Hal ini menjadikan belum utuhnya analisis yang dilakukan karena proses magang sedang terjadi dan belum selesai.

Selain pola 5 :5:1 hasil penelitian juga menunjukkan Kepolisian Republik Indonesia melalui SPN telah melakukan berbagai upaya dan penyempurnaan yaitu perubahan kurikulum, perubahan metode pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan alat instruksi, pelatihan tenaga pendidik. Sebagai upaya menyiapkan polisi agar professional dan mandiri dalam menjalankan tugas pekerjaannya di masyarakat.

## SUMMARY

The Indonesian Police has three ways in its recruitment system, they are:

1. The Governmental Police School (SPN) which requires at least Senior High School graduate or whom from the same degree. Its graduate would become the spear's top point of the police's duty in the society.
2. Police Academy (AKPOI.) which requires at least Senior High School graduate or the well achieved graduate of SPN. Its graduate would become the elite police.
3. The scholar source, which requires the scholars from any kind of discipline.

The education in SPN casts the policemen to be ready to enter the society life with its entire problem, so the policemen are forced to be professional and it means that they have to do their Job according to the police's code of ethics. This police's professionalism requires education as the main factor, start from the basic to the highest level that is PTIK (The College Of Police's Science).

The duty of good professional policemen could be achieved through two types of curriculum; they are theoretical and practical curriculum. The theoretical curriculum is a curriculum, which contains of the introduction and the study of the duty and function of a good policeman as an attendant and as a protector of the society and also as the one who upholds the law. The practical curriculum is a curriculum, which contains of the teaming and training of how to perform the police's duty in the society.

The Purwokerto Governmental Police School trains the policemen in the lowest grade (bintara) for the Central Java area. The educational pattern which is still used until now is a six-month process of study and after that the policemen are sent to be in duty in the society as the one who upholds the public orders and as the spear's top point of the law enforcement but not as the instrument of the authorities.

The only basic change found since the year of 2002 is that the educational pattern from the six-month is changed to be eleven-month which is includes five month study through the process study in SPN, five-month apprentice at the police administrative unit at the county level (polres) and at the local police, and one last month as the rounding off of the whole study. This change is expected to change the SPN graduate to be policemen who are always ready to be in duty and at the end they could perform the duty in the society professionally.

The first research is held on the 900 students who are still in the teaching and learning process (PUB) and on 742 students who are still in the apprentice process at the police administrative unit at the county level (polres) and at the local police. This uncompleted training or apprentice process causes the uncompleted analysis too.

Furthermore, the result of the research shows the Indonesian Police, through education (SPN), has done a various attempts and improvement such as the change of the curriculum and the basic educational system from six-month pattern to 5:5:1 pattern; the addition and reparation of the medium and infrastructure; the teacher's training and also the addition of the instructional tools as the attempts to prepare the professional and the autonomous policemen in performing their duty in the society.

The key terms are police, Police' school and professionalism.

## P R A K A T A

Fungsi polisi dalam masyarakat modern secara konseptual antara lain tercermin dalam Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.28 Tahun 1997 Pasal 3) yang menyatakan fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian "Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah Sebagai Lembaga Pendidikan Dasar Polisi Dalam Rangka Menyiapkan Polisi Profesional Dan Mandiri" bertujuan untuk mengetahui, kinerja Sekolah Polisi Negara dalam menyiapkan para Bintara-polisi yang akan menjalankan tugas pekerjaannya di masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sistem pendidikan di SPN Purwokerto Jawa Tengah.

Penelitian ini dapat diselesaikan atas jasa baik semua pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Purwokerto beserta Seluruh Jajarannya.

Harapan kami hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kepolisian.

Semarang, November 2003

Peneliti

Ani Purwanti

Nur Rochaeti

Kartini Sekartadji

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	ii
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	24
BAB IV METODE PENELITIAN .....	25
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	26
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA	

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini Indonesia sedang berada pada era transformasi, dari otoriter menuju demokrasi. Masuknya “gelombang demokratisasi” di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan perubahan sosial yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya setiap ada perubahan sosial, maka segenap sendi-sendi sosial akan memperoleh dampak positif maupun negatif. Kepolisian sebagai salah satu institusi sosial juga akan merasakan dampak tersebut, bahkan lebih jauh lagi kepolisian harus mengantisipasi segala perubahan sosial ikutan dari masuknya gelombang demokratisasi tersebut, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman.

Menurut Hasyim Asy'ari (*Hasyim Asy'ari (ed.), 2002*) ada dua hal penting yang dihadapi kepolisian sehubungan dengan gelombang demokratisasi ini. *Pertama* “gelombang demoktisasi” akan selalu diwarnai oleh adanya masa ransisi dari otoritarianisme menuju pada tatanan demokratis. Pada titik ini tidak bisa lagi dihindarkan adanya benturan-benturan antar kepentingan, terutama kepentingan antar *status quo* dan kaum reformis. Benturan kepentingan ini kadangkala muncul ke permukaan dalam bentuk serangkaian aksi rusuh massa, bahkan konflik antar etnis. Dalam kondisi yang demikian rumit dan hampir-hampir sulit dipetakan, polisi dihadapkan pada suatu



kondisi untuk harus memilih dua hal, *pertama* antara membela kepentingan rezim otoritarian dan dengan demikian akan berhadapan dengan massa rakyat yang pro-reformasi. Pada posisi *kedua* polisi berada pada barisan pro-reformasi dan harus berani secara politis menjaga jarak dengan rezim otoriter. Keberanian polisi Indonesia untuk mengambil pilihan sulit inilah, nanti pada gilirannya akan memudahkan dirinya untuk memposisikan diri dalam meredam atau meleraikan pertikaian yang kian marak muncul di tengah-tengah masyarakat yang mengalami transisi ini.

*Kedua*, masa transisi dalam “gelombang demokratisasi” yang melanda Indonesia beberapa waktu terakhir ini, pada akhirnya menuntut polisi untuk memposisikan dirinya sebagai bagian dari “masyarakat sipil”. Artinya polisi telah memilih untuk menjaga jarak terhadap karakter rezim yang otoritarian.

Memasuki milenium ketiga, dapat dilihat berubahnya standar perpolisian, di mana penjagaan keamanan dan ketertiban secara represif makin ditinggalkan. Kemampuan polisi untuk melakukan *clearance* terhadap angka kejahatan memang penting, tetapi masih ada yang lebih penting lagi, yaitu mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri. Perang polisi bukan lagi dengan menggunakan “pistol”, tetapi “otak”. Perpolisian makin bergerak ke arah model *problem solving*, *community policing* dan sebagainya. Maka medan perang polisipun memasuki laboratorium, perpustakaan dan mencari solusi melalui penelitian sosial. Perpolisian “protagonis” juga dijadikan andalan model abad ke-21. Perpolisian tradisional lebih menempatkan peranan polisi

sebagai penjaga *status quo*, di mana rakyat tidak terlalu menjadi pertimbangan penting. Ini adalah model perpolisian yang antagonis. Sebaliknya, model protagonis menghendaki polisi yang memiliki empati terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat dan mencoba untuk mengawal dinamika tersebut. Polri perlu cepat-cepat berbenah menghadapi dunia masa depan yang makin terbuka, demokratis, egalitarian, yang akan lebih dapat dilakukan oleh polisi-polisi berjiwa sipil. Dapat kiranya diantisipasi, bahwa untuk menghadapi masalah lingkungan hidup, demokrasi, dan HAM, Polri memerlukan kesiapan sebagai suatu institusi profesional untuk menangani permasalahan yang berkualitas "sipil" tersebut. Untuk itu dalam merancang pendidikan, latihan, anggaran, komando, dan lain-lain untuk menyongsong tugas-tugas spesifik tersebut, otonomi penuh mutlak diperlukan oleh Polri. Bangsa Indonesia membutuhkan polisi-polisi baru yang dapat diusahakan melalui pembangunan struktur yang baru pula (Satjipto Rahardjo, 2002).

Gerakan reformasi telah berdampak hampir dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi adalah minimalisasi peranan militer dalam penyelenggaraan negara, termasuk pemisahan polisi dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai representasi militer. Menjawab tuntutan tersebut, terhitung 1 Juli 2000 Kepolisian Republik Indonesia telah lepas dari Markas Besar TNI dan langsung berada di bawah Kepala Negara. Perubahan status ini sangat strategis bagi jajaran

kepolisian untuk kembali pada jati dirinya semula yaitu sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Polisi mempunyai kemandirian untuk menentukan kebijakan-kebijakannya dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian sebagai penjaga ketertiban masyarakat dan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, bukan lagi menjadi alat penguasa.

Polri memasuki babagan baru, yakni menjadi polisi yang mandiri. Kemandirian Polri berarti adanya otonomi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai profesinya, wewenang dan tanggungjawab tanpa adanya campur tangan apalagi intervensi lembaga lain. Inilah yang dimaksud dengan otonomi operasional Polri.

Kembalinya Polri ke jati dirinya semula yaitu sebagai polisi sipil pada dasarnya merupakan manifestasi dari keandirian polisi baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri maupun sebagai penegak hukum. Untuk itu perlu penataan kembali fungsi, peran dan pekerjaan polisi. Satjipto Rahardjo menggambarkan pekerjaan polisi itu *right in the middle*, yakni bekerjanya berada di tengah-tengah masyarakat. Posisi unik ini bahkan membedakannya dari sesama pekerja hukum seperti jaksa, hakim dan advokat (juga lembaga pemasyarakatan-pen.). Polisi itu bekerja “tanpa sarung tangan” dan “tidak di belakang loket”. Pekerjaannya berhubungan langsung dengan manusia, peristiwa, hubungan-hubungan, termasuk *be killed but not to kill*. Dalam ajaran “perpolisian yang berkemanusiaan”, yang sebetulnya adalah

ideal perpolisian dalam peradaban abad XX ini dikehendaki watak-watak antara lain : (a) semakin menjauhkan dari cara-cara militer dan melibatkan diri secara serius ke dalam hubungan dari hati ke hati dengan seluruh lapisan masyarakat; (b) polisi hendaknya menerima perannya sebagai perantara (*ombusman*) bagi orang-orang lemah, tidak tahu (*ignorant*), kebingungan, frustrasi, pengangguran dst. (*Satjipto Rahardjo, 1999*).

Perubahan status ini mengharuskan adanya perubahan-perubahan mendasar di tubuh kepolisian, yaitu harus mereformasi organisasi, kinerja dan citra diri polisi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan Polri. Visi Polri adalah mewujudkan polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera.

Misi Polri adalah :

- memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis
- memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-empty dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat
- menegakkan hukum secara profesional dan proporsif dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan
- memelihara keamanan dan keteriban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam tingkat integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri

sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

- melanjutkan upaya konsolidasi ke dalam Polri sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri ke depan
- memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi

Sementara itu tujuan Polri adalah tercipta dan terwujudnya keamanan dalam negeri yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.

Banyak tantangan yang dihadapi Polri dalam rangka kembali ke jati dirinya sebagai penjaga ketertiban masyarakat dan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, baik yang bersifat nasional, regional maupun global. Menurut Bimantoro dalam skala nasional, Polri dihadapkan pada berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, sosial budaya dan sosial ekonomi. Globalisasi terutama di bidang komunikasi dan transportasi telah berdampak terhadap perkembangan sistem informasi menjadikan dunia tanpa batas dan mendorong berkembangnya isu-isu global tentang HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup yang turut mewarnai situasi politik di Indonesia, sehingga mendorong berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan sosial politik untuk menuntut berbagai perubahan kebijakan politik pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pertentangan golongan yang mengarah ke SARA, gangguan keamanan bernuansa politik, meningkatnya potensi kerusuhan massal dan tindak kekerasan. Sementara itu dari aspek sosial budaya, masalah yang berkembang baik sebelum masa reformasi maupun memasuki reformasi adalah citra hukum dan aparat yang menurun karena

adanya praktik-pratik penegak hukum yang kurang memberi keadilan serta tidak adanya kepastian hukum. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan kebebasan berserikat, munculnya friksi bernuansa SARA, meningkatnya angka *drop out*, PHK dan pekelahian pelajar maupun kelompok masyarakat serta munculnya gerakan kedaerahan sampai pada separatis. Aspek sosial ekonomi ditandai dengan krisis ekonomi berkepanjangan yang telah membawa perekonomian pada titik paling rendah yang diikuti dengan berbagai dampak lainnya (Bimantoro, 2000).

Kecenderungan regional yang berpengaruh besar pada kinerja Polri adalah perkembangan situasi di berbagai kawasan yang masing-masing ingin melindungi kepentingan negaranya, seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan kawasan Asia dan Asean. Perkembangan kawasan tersebut tentu mempengaruhi stabilitas keamanan di masing-masing negara yang saling berhubungan sesuai dengan kawasannya. Demikian juga dengan Asia, khususnya Asia Tenggara yang berpengaruh langsung terhadap Indonesia. Kecenderungan global ditandai dengan pesatnya perkembangan masyarakat internasional yang menjurus ke arah tatanan global yang semakin sempit dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Konflik di berbagai kawasan dunia yang bersumber dari masalah etnis, agama maupun separatisme, serta berkembangnya kesempatan perdagangan bebas berimplikasi pada Indonesia, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas dalam negeri dan munculnya berbagai kejahatan lintas batas seperti narkoba, *money laundring*, pemalsuan

surat-surat berharga, uang palsu dan sebagainya yang tentunya berpengaruh pada perkembangan kejahatan di dalam negeri.

Sehubungan dengan berbagai tantangan tersebut, maka melalui Kebijakan Strategi Kapolri tahun 2000 s/d 2004, dirumuskan berbagai kebijakan antara lain pembangunan dan kemampuan personil, melalui peningkatan sumber daya manusia yang diarahkan untuk membangun personil Polri yang mampu mengawaki organisasinya dalam tatanan tingkat kekuatan yang memadai, di samping memiliki profesionalisme serta tingkat kesiagaan operasional yang tinggi. Untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat sebagai wujud paradigma baru Polri, maka penggelaran personil operasional di lapangan harus menjadi prioritas, sistem rekrutmen dan pendidikan Polri harus dibenahi, khususnya melalui sistem dan pendidikan serta pengembangan Ilmu Kepolisian (Bimantoro, 2000).

Dalam kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang ideal, maka salah satu perubahan mendasar yang mendesak dilakukan adalah membenahan sistem pendidikan dan rekrutmen anggota kepolisian. Tidak dapat dipungkiri, sistem pendidikan kepolisian selama ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan militer, dimana polisi menjadi bagiannya, yang sebenarnya tidak selalu cocok dengan sifat, fungsi dan tugas polisi yang sesungguhnya. Selama ini sistem rekrutmen polisi dapat melalui tiga jalur, yaitu Sekolah Polisi Negara (selanjutnya ditulis SPN), Akademi Kepolisian dan Sumber Daya Sarjana. SPN diperuntukkan calon bintara (lulusan SLTA)

dan Akpol untuk calon perwira (yang dimulai dari lulusan SLTA dan bintanga lulusan SPN) dan Sumber Daya Sarjana yang diperuntukkan bagi calon perwira yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi.

Mantan Kapolri Rusdihardjo pernah mencanangkan bahwa pada tahun 2003 polisi akan menerapkan *one gate system recruitment* Polisi melalui SPN (Sekolah Polisi Negara). Ini berarti menempatkan SPN sebagai ujung tombak rekrutmen sekaligus pendidikan dasar bagi Polisi, sehingga dapat dikatakan bahwa terciptanya polisi yang profesional dan mandiri menjadi tergantung sekali dengan pendidikan di SPN. Pendidikan dasar kepolisian di SPN selama ini yang hanya dilakukan selama 6 (enam) bulan sudah barang tentu merupakan suatu masalah tersendiri apabila dikaitkan dengan pencapaian profesionalisme polisi. Dengan demikian, untuk menyiapkan *one gate system* dalam rekrutmen polisi, SPN harus menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang nantinya diharapkan dapat mencetak polisi siap pakai yang profesional dan mandiri. Idealnya polisi lulusan SPN sudah menguasai teknis-teknis kepolisian serta mahir dalam penerapannya, karena mereka langsung terjun di tengah-tengah masyarakat yang semakin modern tahu akan hak-haknya untuk dilayani dan dilindungi oleh polisi.

SPN mempunyai arti strategis bagi pembentukan polisi yang mandiri dan profesional, yang akan bekerja di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami transisi adari orde otoriter menuju ke orde demokrasi. Idealnya



pendidikan di SPN telah diubah menyesuaikan tuntutan jaman, tidak lagi berpegang pada pedoman masa lampau.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menghadapi masyarakat demokratis, Polri masih harus mengembangkan lebih lanjut melalui lembaga-lembaga pendidikan. Kita mulai dengan menyinggahi (baca : seleksi) mata ajaran yang tidak diperlukan dan lebih berkonsentrasi pada ajaran untuk membangun orde sosial yang demokratis. Orde sosial yang tidak memiliki sifat terstruktur yang jelas tsb. tentu tidak dapat diberikan dalam pendidikan seperti halnya mengajarkan Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu pengalaman di lapangan merupakan bagian penting dari pembangunan Polri yang mampu melayani dan turut membangun masyarakat demokratis. Kritik-kritik bagaimanapun tajamnya dalam praktik di lapangan sebaiknya dapat memperkaya bahan pelajaran untuk menjadi polisi dalam negara demokrasi. Kurikulum dan mata pelajaran sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk diperkaya oleh pengalaman di lapangan.

## **B. Permasalahan**

SPN sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan pembentukan bintara Polri mempunyai posisi strategis dalam penyediaan sumber daya manusia Polri pada tingkat bintara yang akan langsung terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai ujung tombak Polri. SPN sebagai lembaga pendidikan dasar bagi personil

Polri seyogyanya dapat membentuk bintang yang mandiri dan profesional, sekalipun hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat. Untuk itu di dalamnya terkait berbagai persoalan yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dalam bentuk perumusan masalah maka persoalan-persoalan yang dihadapi SPN dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana organisasi dan kinerja SPN sebagai lembaga pendidikan dasar kepolisian
2. Aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi sistem pendidikan di SPN
3. Bagaimanakah kesiapan SPN dalam mencetak polisi yang mandiri dan profesional